

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 113 Tahun 1973

16 Nopember 1973

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAERAH PROPINSI BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROP. BALI

No.: 8/20/Sekret./D/1973
Tentang
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DAERAH PROPINSI BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.

Membaca

: Surat Ketua Badan Koordinasi Kehumasan Daerah Propinsi Bali tgl. 21 Mei 1973 No. A1/h/2546/73 dan tgl. 25 Mei 1973 No. : A1/h/2635/73 tentang permohonan penguatan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali terhadap Badan Koordinasi Kehumasan Daerah Propinsi Bali;

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk meningkatkan effisiensi dan effektivitas operasi penerangan didaerah Bali, perlu diadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Humas2 Pemerintah Daerah/Lembaga2/Instansi 0 instansi sipil;
 - 2. Bahwa Badan Koordinasi Kehumasan Daerah Propinsi Bali yang dibentuk tgl. 10 Pebruari 1973 atas Prakarsa Kepala Jawatan Penerangan Propinsi Bali dangan DAN SATGAS MASS MEDIA NUSRA yang bertujuan mengadakan koordinasi antara kebijaksanaan dan langkah langkah Pemerintah yang menjamin adanya persamaan dan kesatuan dalam kebijaksanaan dan langkah langkah penerangan dari instansi Pemerintah, perlu dikuatkan dengan menuangkan kedalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali;

Mengingat

- : 1. Undang undang No. 18/1965 yo undang undang No: 6 Tahun 1969
 - 2. Undang undang No. 64 tahun 1958
 - Keputusan Menteri Penerangan R.I. No. Koordinasi 31/Kep./MENPEN/1971, tentang Badan Kehumasan Pemerintah:
 - 4. Instruksi R.I. No. Khusus Menteri Penerangan 03/INSTR./MENPEN/1973 tentang Operasi Penerangan guna pengamanan dan mensukseskan Sidang Umum M.P.R. 1973;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Mengesahkan terbentuknya Badan Koordinasi Kehumasan Pertama

Daerah Propinsi Bali disingkat BAKOHUMAS Daerah Propinsi Bali, dengan susunan pengurus dan keanggotaan sebagaimana

tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini ;

: Pedoman kerja BAKOHUMAS Daerah Propinsi Bali yang Kedua

merupakan landasan dan Program Kerja Dasar Badan tersebut

dalam lampiran II Surat Keputusan ini

: Segala biaya yang menyangkut kegiatan BAKOHUMAS Daerah Ketiga

Propinsi Bali dibebankan kepada masing2 instansi yang

tergabung didalamnya.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Keempat

mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 10 Pebruari

Dengan ketentuan bahwa dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan

perobahan seperlunya.-

Ditetapkan di : D e n p a s a r . Pada tanggal: 23 September 1973 GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

t.t.d.

(SOEKARMEN)

SALINAN2 dari surat Keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
- 2. Bapak Menteri Penerangan R.I. di Jakarta;
- 3. MUSPIDA Propinsi Bali;

- 4. Ketua Pengadilan Tinggi Nusra di Denpasar ;
- 5. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar;
- 6. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali;
- 7. Staf Sekretariat Ktr. Gubernur Kdh. Propinsi Bali di Denpasar ;
- 8. Irda, Kepala Direktorat Khusus, Kepala Direktorat P.M.D., Kepala Direktorat Agraria Propinsi Bali di Denpasar ;
- 9. Para Kepala Jawatan/Dinas/Kantor niveau Propinsi Bali;
- 10. Waka Mada Hansip/Wanra XVIII Bali di Denpasar;
- 11. Direksi Perusahaan2 Daerah (BAPIPDA) Prop. Bali di Denpasar ; Untuk maklum dan
- 12. Yang bersangkutan, untuk dimaklumi dan diindahkan.-

Diundangkan di Denpasar Pada tanggal 16 Nopember 1973. Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

LAMPIRAN Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali Tanggal : 23 September 1973 No. /20/Sekret/D/1973.-

SUSUNAN PENGURUS DAN DAFTAR ANGGOTA BAKOHUMAS DAERAH PROPINSI BALI

	No.	Nama Lengkap	Jawatan / Dinas	Alamat	Telpun
	J <u>rut</u> 1.	2.	3.	4.	5.
I.	1.	PENASEHAT.	3.	т.	3.
1.	1. 2.	Nurdin Sjam B.A Letkol. Abdullah	Kepala Jawatan Penerangan Prop. Bali DAN SATGAS MASS MEDIA LAKSUS KOPKAMTIB DAERAH NUSRA.	Jln. Melati 23 Jln. Kepundung	2811 2981
II.	1.	PENGURUS. Ketua: I.B. Oka Yadnya B.A Wk. Ketua I: Drs. I Gst. Ngr Suarsa	Jawatan Penerangan Propinsi Bali Hubmas Kantor Gubernur.	Jln. Melati 23	2811
		Wk. Ketua II : Tjokorda Gde Raka	Komdak XV Bali.	Jln. Gianyar	2906
		Wk. Ketua : Lettu Tito Mustofa	Korem 163/Wirasatya Bali.	Sanglah	4344
		: Drs. Hotman Siahaan Sekretaris	Jawatan Penerangan Propinsi Bali.	Jln. Melati 23	2811
ш.	1. 2.	ANGGOTA. Drs. Putu Sunaka I.G. Putu Adnyana	Kantor Perw. Perdagangan Prop. Bali Dinas Pertanian Propinsi Bali	Sanglah Jln. Jempiring	4020 2088

3.	E. Prawoto	DOLOG Propinsi Bali	Jln.	4108
4.	Tjokorda Oka	Dinas Pariwisata Daerah Prop. Bali	Jln. Kemuning 1	2397
5.	Subarjo	R.R.I. Studio Denpasar	Jln. Melati	2161
6.	Drs. Sujoso W.	Jawatan Sosial Propinsi Bali	Jln. Pudak 3	4326
7.	W. Rumaksa	Dinas P.U. Propinsi Bali	Jln. Beliton	2372
8.	Moch. Sungkono	Kejaksaan Tinggi Bali	Jalan Sutiyo	4026
9.	Gede Putu Budhiana	Humas D.P.R.D. Propinsi Bali	Jalan Sanur	2084
10.	A.A. Gede Alit Murti	Dinas Perindustrian Prop. Bali	Jln. Melati 31	4548
11.	G.S. Aryantara	Dinas Kehutanan Propinsi Bali	Jln. Kamboja	2665
12.	Priadmodjo	Sional Benoa	Jln. Halmahera 3	4100
13.	I.G. Ngurah Negara	Dinas Kesehatan Propinsi Bali	Jln. Melati	2412
14.	I Nyoman Tirtha	Direktorat Transmigrasi Propinsi Bali	Jln. Kamboja	2952
15.	Siudi	Kantor Penempatan Tenaga Kerja Prop. Bali	Jln. Kepundung	4506
16.	I Made Reta	Cabang P.N. pertamina Propinsi Bali		2245
				2106
17.	I Wayan Geredeg	Ktr. Perw. Dep. P. dan K. Prop Bali di		
		Denpasar		4370
18.	Drs. R. Bambang Tetungko	Kantor Daerah B.R.I. Wilayah Nusra di		
		Denpasar	Jalan Sanur	2009

MENGETAHUI GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

t.t.d.

(SOEKARMEN)

LAMPIRAN II

LAMPIRAN Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali Tanggal: 23 – 9 - 1973 No. /20/Sekret/D/1973.-

PEDOMAN-KERJA

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PROPINSI BALI

I. PENDAHULUAN

Perkembangan politik didaerah ini telah semakin mantap, ter-lebih2 sesudah pelaksanaan Pemilu arah pandangan masyarakat sudah sepenuhnya tertuju kepada bagaimana bias mencapai perbaikan kehidupan.

Dari pelaksanaan Pelita I, yang dewasa ini telah memasuki tahun yang kelima atau terakhir kita telah memperoleh gambaran, bahwa perhatian masyarakat umum sudah tertuju kepada kerja. Dan memang Pelita I telah secara langsung mampu menuntun dan mendidik masyarakat kea rah dan cara kerja yang teratur, berencana dengan tujuan yang jelas.

Maka agar keadaan yang demikian dapat dipelihara dan diperkembangkan menjadi suatu sikap hidup yang gairah, pelaksanaan penerangan ke masyarakat perlu lebih terarah serta diintensipkan dengan sasaran yang lebih terarah pula.

Untuk mencapai maksud itu, perlu pengerahan dan penggunaan alat2 penerangan Pemerataan serta koordinasi antara alat2 Pemerintah itu untuk menghadapi tugas2 pembangunan nasional berasaskan Garis2 Besar Haluan Negara.

II. DASAR DAN TUJUAN PEMBENTUKAN BAKOHUMAS

Badan Koordinasi Kehumasan Daerah Propinsi Bali Atau disingkat menjadi BAKOHUMAS yang dibentuk pada tanggal 10 Pebruari 1973, dasar dan tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan koordinasi antara kebijaksanaan dan langkah2 Pelaksanaan untuk menjamin haknya:

- a. Persamaan dan kesatuan dalam kebijaksanaan dan langkah2 penerangan dari instansi Pemerintah.
- b. Penerangan yang teratur dan berencana, baik yang bersifat operasionil maupun penerangan yang bersifat reaktif, menghadapi pelaksanaan tugas2 pembangunan nasional berdasarkan G.B.H.N. dan Program Kerja Kabinet Pembangunan.
- c. Pengerahan dan penggunaan tenaga dan alat2 penerangan secara effectif untuk mencapai hasil yang se-besar2nya, dan untuk mencegah kesimpang siuran penerangan2 Pemerintah.
- 2. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan umum Pemerintah tsb. :

- a. Tindakan2 dilapangan penerangan menghadapi usaha2 sabotage atau hambatan2 baik oleh sisa2 G. 30 S/PKI maupun usah subvensi lainnya.
- b. Pengerahan dan penggunaan alat2 penerangan Pemerintah serta koordinasi antara alat2 Pemerintah itu untuk menjaga kemantapan keamanan dan ketentraman masyarakat serta kewibawaan Pemerintah.

III. TUGAS DAN TATA KERJA BAKOHUMAS.

1. Tugas Khusus Bakohumas.

- a. Usaha pengumpulan dan penerimaan bahan2 dari anggota.
- b. Penggolongan bahan yang telah masuk.
- c. Pengumpulan hasil dan penggolongan bahan2 dalam penggunaannya.

2. Tugas Umum Bakohumas.

- a. Sekretaris/Sekretariat Bakohumas mengumpulkan dan menerima bahan dari masyarakat selanjutnya diolah dan disalurkan lewat instansi yang bersangkutan.
- b. Menjamin adanya pertukaran bahan2 informasi secara continue antara instansi anggota Bakohumas maupun antara anggota Bakohumas dengan Sekretariat BAKOHUMAS
- c. Mengadakan hubungan yang erat dengan badan satgas Mass Media dan bahan2 Intelegence.

IV. FUNGSI SEKRETARIAT

Untuk menjamin kelancaran kegiatan2 Bakohumas, diperlukan adanya sebuah Sekretariat yang tetap.

Secretariat ini bertugas mengatur dan menetapkan pertemuan2 routine ataupun khusus, mencatat pembicaraan2 dalam pertemuan itu.

Menyelenggarakan usaha2 pelaksanaan pertukaran bahan2 informasi data2 dari masing2 anggota/instansi2 yang diwakili dalam Bakohumas. Menyelenggarakan pekerjaan administrasi dan lain2 yang berhubungan dengan ke Bakohumas tersebut.

V. KEANGGOTAAN BAKOHUMAS

Semua Instansi/Jawatan/Lembaga resmi nivo Propinsi yang memiliki humas, diwakili oleh petugas yang ditunjuk.

VI. RENCANA KERJA BAKOHUMAS

a. Jangka Pendek:

- 1. Menggiatkan/memperkuat Sekretariat Bakohumas.
- 2. Mengadakan kegiatan bersama seperti pertemuan2, diskusi2 dll.
- 3. Mengadakan pertukaran bahan2 penerangan selengkap mungkin.

b. Rencana Jangka Panjang

1. Berusaha mendapatkan tata lasana/ tata cara serta pengetrapannya dalam praktek yang seragam dan pengertian tentang struktur

- keorganisasian Humas dengan melalui seminar2 dll. Sebagainya.
- 2. Guna memudahkan pertukaran bahan2 informaties (exchange of informaties materials) dan untuk menghadapi masalah yang menonjol, maka diadakan komunicatie yang aktif antar secretariat Bakohumas dengan para anggota dan apabila diperlukan pertemuan2 antara sekretarisdengan para anggota yang bersangkutan.

VII. PEMBIAYAAN

Untuk dapat menggerakkan sekretariat sebagaimana mestinya diperlukan adanya pembiayaan. Mengingat pembiayaan yang diperlukan tidak ada, maka sekedar untuk menjamin kebutuhan administrasi dll, maka bagi setiap anggota/instansi yang diwakili dalam Bakohumas untuk sementara waktu ditetapkan/dikenakan yuran Rp. 500,- dan dibayar tiap2 bulan.-

VIII. HARAPAN

Dengan terbentuknya Bakohumas tersebut tugas penerangan di Daerah ini, diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan lebih berisi serta lengkap. Maka diharapkan semua instansi yang diwakili dalam Bakohumas itu, secara sungguh2 dapat memenuhi kewajibannya dan menjamin kontinuitas pertukaran bahan2 penerangan dimaksud.

MENGETAHUI GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

t.t.d.

(SOEKARMEN).-